



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULKIFLI ARIEF
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 4031

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/143 m² di KOTA SOLOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m²/211 m² di KOTA SOLOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
3. Tanah Seluas 267 m² di PADANG , HASIL SENDIRI Rp.
400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m²/145 m² di KOTA PADANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 538.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 220.000.000
2. MOTOR, HONDA NF125 TR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 G M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.106.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.007.874.672**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	8.159.980.672
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.159.980.672

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 September 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.